



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Negosiasi Kekuasaan di Pantai Lasiana: Studi Atas Tiga Model Pengelolaan Lahan (Pemerintah, Tokoh Lokal, dan Swasta)

Power Negotiations on Lasiana Beach: A Study of Three Land Management Models (Government, Local Leaders, and the Private Sector)

Milsa Madeta Irlen Hanas¹, Ananias Ryoan Philip Jacob², Diana S.A Natalia Tabun³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT

***Corresponding Author: E-mail: milsahanas58@gmail.com¹, riyoan.jacob@staf.undana.ac.id², dianatabun@staf.undana.ac.id³**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 20 July, 2026

Kata Kunci:

Negosiasi Kekuasaan, Pengelolaan Lahan, Wisata Pesisir, *Power Cube*, Pantai Lasiana

Keywords:

Power Negotiation, Land Management, Coastal Tourism, Power Cube, Lasiana Beach

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11650

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis negosiasi kekuasaan antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah daerah, pengelola kawasan, tokoh lokal, pihak swasta, serta pelaku UMKM. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kerangka analisis teori *Power Cube* dari John Gaventa yang mencakup dimensi bentuk kekuasaan, ruang kekuasaan, dan level kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Pantai Lasiana merupakan hasil dari negosiasi kekuasaan yang kompleks dan multipolar antara ketiga aktor, di mana pemerintah memiliki kekuasaan formal melalui regulasi dan kebijakan namun tidak sepenuhnya dominan karena dibatasi oleh kekuasaan tersembunyi dan tidak terlihat yang dimiliki oleh tokoh lokal dan pihak swasta; tokoh lokal memanfaatkan legitimasi sosial dan historis untuk mempertahankan kontrol atas lahan, sementara pihak swasta menggunakan kekuatan modal dan akses perizinan untuk memperkuat posisinya dalam pengelolaan kawasan. Dalam dimensi ruang kekuasaan, interaksi antara ruang tertutup, ruang undangan, dan ruang klaim menjadi arena utama negosiasi antaraktor, sedangkan pada level kekuasaan, praktik pengelolaan menunjukkan bahwa dinamika lokal sangat memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Interaksi antaraktor cenderung berlangsung dalam bentuk kompromi, toleransi, dan penyesuaian kepentingan dibandingkan konflik terbuka. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Lasiana tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh relasi sosial,

praktik informal, dan strategi aktor dalam mempertahankan kepentingannya, sehingga kawasan ini menjadi arena politik lokal di mana kekuasaan terus dinegosiasikan dalam praktik pengelolaan ruang wisata pesisir.

ABSTRACT

This study aims to analyze power negotiation among the government, local figures, and private actors in land management within the Lasiana Beach Tourism Area, Kupang City, using a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving informants from local government, site managers, local figures, private sector actors, and MSME participants. Data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing, guided by John Gaventa's Power Cube theory, which consists of dimensions of forms of power, spaces of power, and levels of power. The findings reveal that land management in Lasiana Beach is the result of complex and multipolar power negotiations among the three actors, where the government holds formal authority through regulations and policies but is not entirely dominant due to the presence of hidden and invisible power exercised by local figures and private actors; local figures rely on social and historical legitimacy to maintain control over land, while private actors utilize capital strength and licensing access to reinforce their position in managing the area. In terms of spaces of power, the interaction between closed spaces, invited spaces, and claimed spaces becomes the main arena of negotiation, while at the level of power, local dynamics significantly influence the implementation of regional government policies. Actor interactions tend to occur through compromise, tolerance, and adjustment of interests rather than open conflict. Therefore, this study concludes that the management of the Lasiana Beach Tourism Area is not solely determined by formal policies but is also shaped by social relations, informal practices, and actor strategies in maintaining their interests, positioning the area as a local political arena where power is continuously negotiated in the practice of coastal tourism space management.

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir merupakan ruang strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik yang penting dalam pembangunan daerah, khususnya melalui sektor pariwisata. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata pesisir yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, pengelolaan kawasan pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan lingkungan, melainkan juga melibatkan relasi kekuasaan antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda terhadap ruang dan sumber daya pesisir (Mathelda Naatonis, 2023).

Salah satu kawasan wisata pesisir yang memiliki peran penting di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pantai Lasiana yang terletak di Kota Kupang. Pantai ini telah berkembang menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Sejak pertama kali dikelola pemerintah pada tahun 1970-an, Pantai Lasiana mengalami beberapa kali perubahan kewenangan pengelolaan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota Kupang. Berbagai upaya pembangunan fasilitas wisata telah dilakukan, seperti pembangunan area kuliner, gazebo, panggung terbuka, pedestrian pantai, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Meskipun demikian, sejumlah fasilitas masih mengalami kerusakan dan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola kawasan wisata tersebut (Riwukore et al., 2021).

Data Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari Pantai Lasiana selama periode 2021-2023 belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan hanya mencapai 54,30 persen dari target, meningkat menjadi 64,39 persen pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 39,68

persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi kawasan belum sepenuhnya dapat dioptimalkan melalui mekanisme pengelolaan yang ada.

Dalam praktiknya, pengelolaan Pantai Lasiana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kawasan ini memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda. Pemerintah daerah berperan melalui kewenangan formal dalam mengatur pemanfaatan kawasan, pengelolaan aset, serta penarikan retribusi. Di sisi lain, tokoh lokal memiliki legitimasi sosial dan historis yang memungkinkan mereka mempertahankan penguasaan atas sebagian ruang pesisir. Sementara itu, pihak swasta hadir melalui investasi dan pengembangan usaha wisata yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Kehadiran ketiga aktor tersebut menciptakan pola pengelolaan multipolar yang memperlihatkan adanya proses negosiasi, kompromi, maupun kontestasi kepentingan dalam pengelolaan kawasan wisata pesisir.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Lasiana tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas administratif atau ekonomi semata, melainkan juga sebagai arena politik lokal tempat berbagai aktor berupaya mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui regulasi formal pemerintah, tetapi juga melalui legitimasi sosial, penguasaan sumber daya ekonomi, serta praktik-praktik informal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan wisata pesisir menjadi ruang negosiasi yang mempertemukan kepentingan negara, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Kajian mengenai pengelolaan Pantai Lasiana sebelumnya umumnya berfokus pada aspek pengembangan destinasi wisata, fasilitas pendukung, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Riwukore et al. (2021) menyoroti kondisi eksisting destinasi wisata Pantai Lasiana berdasarkan aspek atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan kelembagaan pariwisata. Penelitian Yohanes N. Gela Loy (2025) lebih menekankan kontribusi Pantai Lasiana terhadap PAD, sedangkan penelitian Ilyas et al. (2023) berfokus pada daya tarik wisata dan preferensi pengunjung. Sementara itu, penelitian mengenai kawasan pesisir di daerah lain menunjukkan bahwa pengelolaan ruang pesisir sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa dan negosiasi antaraktor. Sujadmi dan Murtasidin (2020) menemukan adanya konflik dan kontestasi kepentingan dalam tata ruang pesisir di Bangka Belitung, sedangkan Gugat, Abubakar, dan Susanti (2022) menunjukkan dominasi pemerintah dalam revitalisasi kawasan pesisir Teluk Jakarta. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji negosiasi kekuasaan antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dalam pengelolaan kawasan wisata pesisir berbasis lahan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Secara empiris, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana relasi antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta memengaruhi pengelolaan lahan di kawasan wisata Pantai Lasiana. Secara teoretis, kajian mengenai negosiasi kekuasaan dalam pengelolaan kawasan wisata pesisir masih jarang menggunakan pendekatan yang mampu menjelaskan interaksi kekuasaan secara multidimensional.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Power Cube yang dikembangkan oleh John Gaventa. Teori ini memandang kekuasaan melalui tiga dimensi utama, yaitu bentuk kekuasaan (*forms of power*), ruang kekuasaan (*spaces of power*), dan tingkatan kekuasaan (*levels of power*). Melalui kerangka tersebut, penelitian dapat menjelaskan bagaimana kewenangan formal pemerintah, legitimasi sosial tokoh lokal, dan kekuatan modal pihak swasta saling berinteraksi serta dinegosiasikan dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Lasiana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis negosiasi kekuasaan antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan di kawasan wisata Pantai Lasiana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai relasi kekuasaan dalam tata kelola kawasan wisata pesisir, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika negosiasi kekuasaan antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang. Studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara kontekstual pada satu lokasi tertentu yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan ekonomi yang khas.

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena memperlihatkan adanya tiga model pengelolaan lahan yang melibatkan pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta, sehingga relevan untuk mengkaji praktik negosiasi kekuasaan dalam pengelolaan kawasan wisata pesisir.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti. Informan terdiri atas perwakilan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengelola Kawasan Wisata Pantai Lasiana, pemilik OCD Beach Café sebagai tokoh lokal, pengelola La Cove Café sebagai pihak swasta, serta pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan Pantai Lasiana.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pola hubungan, kepentingan, strategi, dan proses negosiasi antaraktor dalam pengelolaan lahan. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan kawasan dan interaksi para aktor di lapangan. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen seperti peraturan pemerintah, laporan instansi terkait, arsip pengelolaan kawasan wisata, serta sumber literatur yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan kategorisasi tematik untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negosiasi Kekuasaan (*Power Negotiation*) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata Pantai Lasiana tidak hanya merupakan aktivitas administratif, tetapi juga menjadi arena negosiasi kekuasaan yang melibatkan pemerintah, tokoh lokal, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam perspektif Teori Power Cube yang dikemukakan oleh Gaventa (2006), kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh satu aktor, melainkan sebagai relasi yang terus diproduksi, dipertahankan, dan dinegosiasikan melalui berbagai interaksi sosial.

Pemerintah memang memiliki legitimasi formal sebagai pengelola kawasan karena Pantai Lasiana merupakan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut karena dalam praktiknya selalu berhadapan dengan kepentingan aktor lain. Resistensi yang dilakukan pelaku UMKM terhadap kebijakan retribusi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang berusaha memengaruhi keputusan pemerintah melalui protes dan penyampaian aspirasi.

Negosiasi kekuasaan juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah mempertahankan kewenangan formal atas lahan yang dimiliki, sementara pihak swasta memperoleh akses melalui mekanisme kontrak dan perizinan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya kompromi kepentingan yang memungkinkan kedua pihak memperoleh keuntungan. Pemerintah mendapatkan pemasukan daerah dan dukungan investasi, sedangkan pihak swasta memperoleh ruang untuk mengembangkan usaha.

Di sisi lain, tokoh lokal juga terlibat dalam proses negosiasi melalui legitimasi yang berasal dari kepemilikan lahan dan pengakuan sosial masyarakat. Posisi ini memberikan daya tawar yang kuat sehingga pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengontrol seluruh kawasan wisata. Dengan demikian, negosiasi kekuasaan di Pantai Lasiana berlangsung secara dinamis melalui proses kompromi, adaptasi, resistensi, dan kerja sama antaraktor. Temuan ini sejalan dengan pandangan Gaventa (2006) bahwa kekuasaan selalu bersifat relasional dan terbentuk melalui interaksi yang terus berlangsung di antara berbagai aktor sosial.

Bentuk Kekuasaan (Form of Power) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Menurut Gaventa (2006), kekuasaan dapat dianalisis melalui tiga bentuk utama, yaitu visible power, hidden power, dan invisible power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk kekuasaan tersebut hadir secara bersamaan dalam pengelolaan Pantai Lasiana. Visible power terlihat melalui kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan, mengatur pemanfaatan kawasan, menentukan tarif retribusi, serta memberikan izin usaha kepada pelaku ekonomi. Bentuk kekuasaan ini tampak secara nyata karena diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan yang dapat diamati secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah menjadi aktor yang paling dominan dalam dimensi ini karena memiliki dasar hukum dan kewenangan administratif yang kuat.

Selain visible power, pemerintah juga menunjukkan hidden power melalui kemampuannya menentukan agenda pembangunan kawasan wisata. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan program mana yang dianggap prioritas dan layak untuk direalisasikan. Proses penentuan agenda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian dan isu mana yang tidak menjadi prioritas kebijakan.

Sementara itu, invisible power terlihat melalui penerimaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah sebagai pengelola kawasan. Meskipun sebagian masyarakat merasa dirugikan oleh kebijakan tertentu, mereka tetap mengakui kewenangan pemerintah dan cenderung mematuhi aturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya melalui aturan formal, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran dan cara pandang masyarakat.

Pada sisi lain, tokoh lokal menunjukkan dominasi pada bentuk invisible power yang bersumber dari legitimasi sosial dan historis atas kepemilikan lahan. Pengakuan masyarakat terhadap hak kepemilikan tersebut menciptakan otoritas yang tidak tertulis tetapi sangat berpengaruh dalam pengelolaan kawasan. Selain itu, tokoh lokal juga memiliki hidden power melalui kontrol terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung di atas lahan miliknya.

Pihak swasta menunjukkan visible power melalui legalitas usaha dan kerja sama pemanfaatan lahan dengan pemerintah. Namun, kekuatan utama swasta terletak pada hidden power berupa kemampuan membentuk pasar, menentukan standar pelayanan, dan menciptakan preferensi wisatawan melalui strategi branding dan inovasi usaha. Swasta juga memiliki invisible power karena mampu membentuk persepsi masyarakat mengenai konsep wisata modern yang berbasis hospitality dan pelayanan profesional.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekuasaan dalam pengelolaan Pantai Lasiana tidak terpusat pada satu aktor. Pemerintah dominan dalam visible power, tokoh lokal kuat dalam invisible power, sedangkan pihak swasta unggul dalam hidden power. Ketiga bentuk kekuasaan tersebut saling berinteraksi dan membentuk konfigurasi kekuasaan yang kompleks dalam pengelolaan kawasan wisata.

Ruang Kekuasaan (Space of Power) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Dimensi space of power dalam Teori Power Cube menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui ruang-ruang tertentu yang dapat berupa closed space, invited space, dan claimed/created space (Gaventa, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga ruang kekuasaan tersebut dapat ditemukan dalam pengelolaan Pantai Lasiana. Pemerintah mendominasi closed space melalui kewenangan formal dalam merumuskan kebijakan, menentukan retribusi, mengatur pemanfaatan lahan, serta menetapkan arah pembangunan kawasan wisata. Ruang ini bersifat eksklusif karena akses terhadap proses pengambilan keputusan strategis hanya dimiliki oleh aktor yang berada dalam struktur pemerintahan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan invited space melalui forum sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan, dan pertemuan dengan masyarakat maupun pelaku usaha. Meskipun ruang ini memberikan kesempatan partisipasi kepada masyarakat, kendali utama tetap berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi yang terjadi lebih bersifat konsultatif daripada menentukan keputusan secara langsung.

Di sisi lain, tokoh lokal membangun claimed space berdasarkan kepemilikan lahan yang diwariskan secara turun-temurun. Ruang tersebut tidak diberikan oleh pemerintah, tetapi diklaim dan dipertahankan melalui legitimasi sosial yang diakui masyarakat. Melalui ruang ini, tokoh lokal memiliki otonomi dalam mengelola usaha dan menentukan arah pengembangan lahan yang dimiliki.

Pihak swasta berada pada posisi yang unik karena memperoleh akses melalui invited space dalam bentuk perizinan dan kerja sama dengan pemerintah. Namun, setelah memperoleh akses tersebut, pihak swasta mengembangkan created space melalui investasi, inovasi usaha, serta pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, swasta tidak hanya memanfaatkan ruang yang diberikan, tetapi juga menciptakan ruang pengaruh baru melalui aktivitas bisnis yang dijalankan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ruang kekuasaan dalam pengelolaan Pantai Lasiana bersifat plural dan saling beririsan. Tidak ada satu aktor yang sepenuhnya menguasai seluruh ruang, melainkan terdapat berbagai ruang kekuasaan yang diciptakan, dipertahankan, dan dinegosiasikan secara terus-menerus oleh masing-masing aktor.

Tingkatan Kekuasaan (Level of Power) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Dimensi level of power menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja pada berbagai tingkatan yang saling berhubungan, mulai dari tingkat lokal hingga institusional yang lebih tinggi (Gaventa, 2006). Hasil penelitian menunjukkan adanya hierarki kekuasaan yang cukup jelas dalam pengelolaan Pantai Lasiana.

Pemerintah berada pada level tertinggi karena memiliki legitimasi formal dan kewenangan institusional yang bersumber dari regulasi nasional maupun daerah. Kewenangan tersebut memberikan posisi strategis bagi pemerintah dalam menentukan arah pengelolaan kawasan serta mengontrol berbagai aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Pada level berikutnya terdapat pihak swasta yang beroperasi di antara level lokal dan institusional. Swasta memperoleh legitimasi melalui mekanisme formal seperti perizinan dan kerja sama dengan pemerintah, tetapi menjalankan aktivitasnya secara langsung di tingkat lokal. Posisi ini memungkinkan swasta menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Tokoh lokal menempati level menengah yang bersumber dari legitimasi sosial dan kepemilikan lahan. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal seperti pemerintah, tokoh lokal tetap memiliki pengaruh yang signifikan karena menguasai sumber daya strategis yang berada dalam kawasan wisata.

Sementara itu, pelaku UMKM berada pada level paling bawah karena memiliki akses yang terbatas terhadap proses pengambilan keputusan. Mereka lebih sering menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan yang ditetapkan oleh aktor pada level yang lebih tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan umumnya bersifat reaktif melalui penyampaian aspirasi atau protes terhadap kebijakan tertentu.

Temuan ini memperlihatkan bahwa distribusi kekuasaan dalam pengelolaan Pantai Lasiana masih bersifat hierarkis. Semakin tinggi posisi suatu aktor dalam struktur kekuasaan, semakin besar pula kemampuannya mempengaruhi arah kebijakan dan pengelolaan kawasan.

Interaksi Antar Aktor (*Interaction Actors*) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Dalam perspektif Power Cube John Gaventa, interaksi antar aktor dalam pengelolaan Pantai Lasiana menunjukkan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor, melainkan tersebar dalam berbagai ruang kekuasaan yang saling beririsan. Pemerintah menguasai *closed space* melalui kewenangan formal dalam pengambilan keputusan, sementara tokoh lokal membangun *claimed space* berdasarkan kepemilikan lahan dan legitimasi historis. Di sisi lain, pihak swasta memperoleh akses melalui *invited space* yang kemudian berkembang menjadi ruang yang lebih mandiri melalui aktivitas bisnis dan investasi. Kondisi ini menghasilkan pola hubungan yang bersifat saling bergantung namun tidak sepenuhnya terintegrasi. Dari sisi bentuk kekuasaan (*form of power*), pemerintah memanfaatkan *visible power* melalui regulasi dan kebijakan, sedangkan tokoh lokal mengandalkan *invisible power* yang bersumber dari pengakuan sosial atas kepemilikan lahan. Pihak swasta menunjukkan *hidden power* melalui kemampuan mengendalikan pasar dan membentuk preferensi wisatawan. Perbedaan posisi pada *level of power* juga memperlihatkan bahwa pemerintah berada pada tingkat kekuasaan tertinggi, sedangkan tokoh lokal dan swasta berada pada tingkat menengah dengan sumber daya yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Lasiana merupakan arena negosiasi kekuasaan yang dinamis, di mana setiap aktor berupaya mempertahankan serta memperluas pengaruhnya dalam pengelolaan kawasan wisata.

Peran Pemerintah (*Government*) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Berdasarkan teori Power Cube, pemerintah merupakan aktor yang paling dominan dalam pengelolaan Pantai Lasiana karena menguasai *closed space* melalui kewenangan hukum dan institusional. Posisi ini memungkinkan pemerintah menentukan kebijakan, mengatur pemanfaatan lahan, serta mengendalikan aktivitas ekonomi di kawasan wisata. Dominasi pemerintah terlihat melalui *visible power* dalam bentuk regulasi, perizinan, dan penetapan retribusi. Selain itu, pemerintah juga memiliki *hidden power* melalui kemampuan menentukan agenda pembangunan dan prioritas program yang akan dijalankan. Sementara itu, *invisible power* tercermin dari penerimaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengelola kawasan. Pada dimensi *level of power*, pemerintah berada pada posisi tertinggi karena didukung oleh struktur kelembagaan dan dasar hukum yang kuat. Meskipun demikian, kekuasaan pemerintah tidak sepenuhnya absolut karena tetap dipengaruhi oleh keberadaan tokoh lokal, kepentingan swasta, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, dominasi pemerintah dalam pengelolaan Pantai Lasiana menunjukkan bahwa kekuasaan formal tetap menjadi faktor utama, tetapi pelaksanaannya berlangsung melalui proses negosiasi dengan aktor lainnya.

Peran Tokoh Lokal (*Local Figures*) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Tokoh lokal memiliki posisi penting dalam pengelolaan Pantai Lasiana melalui penguasaan *claimed/created space* yang bersumber dari kepemilikan lahan dan legitimasi historis. Dalam kerangka Power Cube, ruang ini tidak diberikan oleh pemerintah, tetapi dibangun secara mandiri berdasarkan hak yang diakui oleh masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan tokoh lokal mempertahankan kontrol terhadap lahan dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di atasnya. Dari dimensi *form of power*, kekuatan utama tokoh lokal terletak pada *invisible power*, yaitu pengaruh yang berasal dari pengakuan sosial terhadap hak kepemilikan lahan. Selain itu, terdapat *hidden power* yang terlihat dari kemampuan mereka mengatur pemanfaatan ruang dan pengelolaan usaha secara mandiri. Pada dimensi *level of power*, tokoh lokal berada pada posisi menengah karena tidak memiliki kewenangan formal seperti pemerintah, tetapi tetap mempunyai pengaruh yang kuat melalui penguasaan sumber daya lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan historis menjadi sumber kekuasaan yang mampu memperkuat posisi tokoh lokal dalam dinamika pengelolaan kawasan wisata.

Peran Swasta (*Private*) dalam Pengelolaan Pantai Lasiana

Dalam perspektif Power Cube, pihak swasta beroperasi pada ruang kekuasaan yang bersifat hibrid antara *invited space* dan *created space*. Akses awal diperoleh melalui kerja sama dan perizinan yang diberikan pemerintah, namun dalam perkembangannya swasta mampu membangun ruang kekuasaan sendiri melalui investasi, jaringan ekonomi, dan aktivitas bisnis. Dari dimensi *form of power*, swasta menunjukkan *visible power* melalui keberadaan usaha yang legal dan terorganisasi, sedangkan *hidden power* tampak dalam kemampuan memengaruhi pasar, membentuk preferensi wisatawan, serta menentukan standar pelayanan wisata. Selain itu, terdapat unsur *invisible power* yang tercermin dalam upaya membentuk persepsi masyarakat mengenai pariwisata modern dan profesional. Pada dimensi *level of power*, swasta berada pada posisi menengah karena memiliki sumber daya ekonomi yang kuat, meskipun tetap bergantung pada kebijakan dan regulasi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi menjadi instrumen penting yang memungkinkan swasta memainkan peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Pantai Lasiana.

Pengelolaan Lahan Di Pantai Warna (*Land Management on Lasiana Beach*)

Analisis menggunakan teori Power Cube menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Pantai Lasiana berlangsung dalam konfigurasi kekuasaan yang terfragmentasi. Pemerintah menguasai *closed space* melalui kewenangan formal atas aset daerah dan regulasi pemanfaatan lahan. Di sisi lain, tokoh lokal mengendalikan *claimed/created space* berdasarkan kepemilikan lahan yang memiliki legitimasi historis, sedangkan pihak swasta memperoleh akses melalui *invited space* yang kemudian berkembang menjadi ruang ekonomi berbasis investasi. Dari dimensi *form of power*, pemerintah memanfaatkan *visible power* dan *hidden power* dalam menentukan legalitas pemanfaatan lahan, sementara tokoh lokal mengandalkan *invisible power* yang berasal dari pengakuan sosial atas hak kepemilikan. Swasta memanfaatkan *hidden power* melalui kemampuan mengoptimalkan nilai ekonomi lahan dan mengembangkan aktivitas usaha. Pada dimensi *level of power*, pemerintah menempati posisi tertinggi, diikuti oleh tokoh lokal dan swasta yang memiliki sumber daya berbeda, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang relatif lebih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Pantai Lasiana merupakan arena negosiasi kekuasaan yang kompleks, di mana setiap aktor berusaha mempertahankan dan memperluas kontrol terhadap ruang sesuai dengan kepentingan dan sumber daya yang dimiliki.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Pantai Lasiana merupakan arena negosiasi kekuasaan yang melibatkan pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dengan sumber kekuasaan yang berbeda-beda. Berdasarkan analisis Teori Power Cube John Gaventa, pemerintah memiliki posisi dominan melalui kekuasaan formal yang diwujudkan dalam regulasi, kebijakan, dan kewenangan pengelolaan kawasan. Namun, dominasi tersebut tidak bersifat absolut karena dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki tokoh lokal serta kekuatan ekonomi yang dimiliki pihak swasta.

Dalam dimensi *form of power*, pemerintah cenderung mendominasi *visible power*, sementara tokoh lokal memperoleh pengaruh melalui *invisible power* yang bersumber dari kepemilikan lahan dan legitimasi sosial. Di sisi lain, pihak swasta memperlihatkan kekuatan melalui *hidden power* dengan kemampuan mengendalikan aktivitas ekonomi, membangun branding wisata, dan memengaruhi preferensi pengunjung. Pada dimensi *space of power*, pemerintah menguasai *closed space* melalui kewenangan formal, sedangkan tokoh lokal dan pihak swasta memanfaatkan *claimed/created space* dan *invited space* untuk memperluas pengaruh dalam pengelolaan kawasan.

Selanjutnya, pada dimensi *level of power*, pemerintah berada pada posisi tertinggi karena didukung legitimasi institusional dan regulasi, sementara tokoh lokal dan pihak swasta berada pada level menengah dengan basis kekuasaan yang berbeda. Pelaku UMKM menempati posisi paling rendah karena memiliki akses yang terbatas terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dalam pengelolaan Pantai Lasiana masih bersifat tidak merata.

Secara keseluruhan, pengelolaan lahan di Pantai Lasiana memperlihatkan adanya tiga model pengelolaan yang berjalan secara bersamaan, yaitu pengelolaan berbasis negara, pengelolaan berbasis kepemilikan lokal, dan pengelolaan berbasis investasi. Interaksi ketiga model tersebut menghasilkan pola relasi yang dinamis melalui proses kompromi, adaptasi, dan negosiasi kepentingan yang terus berlangsung. Dengan demikian, pengelolaan Pantai Lasiana tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga mencerminkan praktik politik lokal yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan didistribusikan, dipertahankan, dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor.

DAFTAR RUJUKAN

- Cornwall, A. (2002). *Making spaces, changing places: Situating participation in development*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Data target dan realisasi penerimaan pendapatan wisata Pantai Lasiana tahun 2021–2023*. Kupang.
- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Database pariwisata dan ekonomi kreatif NTT 2024*. Kupang.
- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *Rekapan pendapatan Pantai Lasiana 2019–2025*. Kupang.
- Dokumen PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2022). *Laporan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Pantai Lasiana*. Kupang.
- Gaventa, J. (2006). *Finding the spaces for change: A power analysis*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Gugat, A., Abubakar, A., & Susanti, D. (2022). Revitalisasi kawasan pesisir Teluk Jakarta dalam perspektif relasi kekuasaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 115–128.
- Ilyas, M., Faggidae, A. H. J., Foenay, C. C., & Faggidae, R. P. C. (2023). Pengaruh daya tarik wisata Pantai Lasiana terhadap tingkat preferensi anak millennial di Kota Kupang. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 4(4), 1143–1159.
- Loy, Y. N. G., Malut, M. G., & Timuneno, A. Y. W. (2025). Analisis penerimaan aset tetap dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD): Studi kasus pada Pantai Lasiana Kupang. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 3(3), 113–123.
- Naatonis, M. (2023). Kebijakan pengembangan pariwisata daerah dan pengelolaan wisata pesisir di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 201–218.
- Riwukore, J. R., Niron, M., & Benu, F. (2021). Pengelolaan dan kontribusi wisata Pantai Lasiana terhadap PAD Kota Kupang. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 97–109.
- Sujadmi, & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan tata ruang laut: Konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 165–178.